

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak bumi merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, karena memiliki proses pembentukan yang cukup lama serta jumlah dan persediaan yang terbatas. Dewasa ini cadangan minyak bumi kian menipis, hal ini disebabkan pola konsumsi minyak bumi yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun yang digunakan baik untuk perindustrian, ataupun untuk keperluan bahan bakar kendaraan. Oleh karena cadangan yang kian menipis serta permintaan dunia yang semakin tinggi, sehingga harga minyak dunia terus merangkak naik.

Harga minyak dunia dipertengahan tahun 2008 mencapai angka pada kisaran US\$140/barel (ANTARA,02/07/08) menjadikan pemerintah kewalahan dalam pengalokasian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Berdasarkan hal tersebut kemungkinan terjadinya pembengkakan APBN yang dikhawatirkan pemerintah. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut maka pemerintah merencanakan adanya kenaikan BBM. Tepat pada tanggal 23 Mei 2008 diresmikanlah kenaikan BBM yang berkisar antara 25-30%. Adanya rencana kenaikan harga BBM membuat masyarakat menjadi cemas.

Dengan ditetapkannya tarif baru harga bahan bakar minyak tersebut, membuat pemerintah mengambil kebijakan guna membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup. Penduduk miskin menurut Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2007, di Indonesia jumlahnya sebesar 37.17 juta orang atau sebesar 16.58%. Penduduk miskin pada bulan Maret 2006 tercatat sebesar 39.30 juta (17.75%). Ini berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2007 masih lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan Februari 2005, dimana persentase penduduk miskin sebesar 15,97% (BPS, 2007).

Kebijakan pemerintah guna meringankan beban masyarakat miskin adalah pengguliran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai masyarakat miskin dan memenuhi persyaratan penerima BLT. BLT tersebut digulirkan guna meminimalisir adanya pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran, karena sejauh ini penikmat BBM bersubsidi bukan hanya mereka kalangan menengah kebawah, melainkan pula mereka yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. Dalam kebijakannya BPS menjelaskan, Pemerintah pusat akan menyalurkan BLT tahun 2008, dimana penyaluran I ini akan dilakukan berdasarkan hasil pendataan Sensus Ekonomi yang dilakukan oleh BPS tahun 2005-2006, BPS juga akan mengadakan lagi *updating* di bulan September-Oktober 2008 untuk program 2009 dan datanya akan digunakan untuk penyaluran Bantuan Operasi Sekolah

(BOS), Askeskin, beras miskin, Infrastruktur pedesaan dan lain-lain (www.jogja.go.id, 2008).

Syarat menjadi penerima BLT terbilang cukup sulit. Setiap rumah tangga harus memenuhi minimal 9 dari 14 persyaratan yang telah dibuat. Antara lain, luas lantainya kurang dari delapan meter persegi/orang dengan jenis lantai tanah, bambu, atau kayu murahan. Dinding yang digunakan terbuat dari bambu, rumbia, atau bahan berkualitas rendah lainnya. Rumah yang tidak memiliki fasilitas WC dengan sumber air minum dari sumur atau air tidak terlindung, serta penerangannya bukan listrik, juga dikategorikan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebelumnya disebut sebagai Rumah tangga Miskin (RTM). Variabel penentu RTS lainnya adalah konsumsi daging atau susu minimal satu kali seminggu. Warga dapat dikategorikan miskin jika frekuensi makannya dalam sehari maksimal hanya dua kali dan hanya membeli pakaian satu stel setahun. Petani yang memiliki lahan kurang dari setengah hektare, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, atau pekerjaan lain dalam sebuah rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah Rp 600 ribu juga menjadi penilaian memperoleh BLT.

Di Indonesia jumlah rumah tangga miskin penerima BLT berjumlah 15.503.295 Kepala Keluarga (KK), sedangkan di Jawa Barat sendiri jumlah RTS yang memenuhi syarat menerima BLT saat ini mencapai 2.897.807 RTS. Bila dibandingkan dengan tahun 2005, terdapat penurunan sebesar 7.410 RTS, dari penerima BLT 2005 yakni sebanyak

2.905.217 RTS. Jumlah RTS penerima BLT tahun 2005 di Kota Bandung sendiri tercatat hingga 84.287 RTS (BPS, 2006).

Adanya kenaikan harga BBM ini tentunya menjadi bola salju pada merangkaknya harga-harga bahan pokok lainnya, yang mengakibatkan meningkatnya tingkat inflasi hingga mencapai 4%, namun agaknya kehadiran BLT mungkin sedikitnya dapat membantu perekonomian masyarakat miskin. Biasanya uang yang di peroleh tanpa alasan usaha, orang dapat memanfaatkan secara sembarangan dalam arti tanpa perhitungan prioritas kebutuhan. Mungkin saja orang miskin menggunakannya tidak kepada kebutuhan yang mendesak yang sebenarnya mereka rasakan akan tetapi pada hal-hal lainnya di luar kebutuhan tersebut, berdasarkan hal itu, penulis ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Apakah ada perbedaan atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka ditetapkan perumusan masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan pemanfaatan bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin perkotaan di Kota Bandung dan masyarakat miskin pedesaan di Kabupaten Bandung Barat?
2. Apakah bantuan langsung tunai mencapai sasaran yang tepat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengidentifikasi perbandingan pemanfaatan bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat miskin pedesaan.
2. Menganalisis tepat atau tidaknya sasaran penerima bantuan langsung tunai.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, besar harapan penulis dapat bermanfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut

1. Mendapatkan informasi terkini berkenaan dengan pemanfaatan bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin.
2. Mendapatkan gambaran profil masyarakat miskin penerima bantuan langsung tunai di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
3. Mendapatkan informasi sebaran masyarakat miskin di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
4. Mendapatkan gambaran objektif dan terkini berkenaan dengan adanya suatu fenomena bantuan langsung tunai yang nantinya dapat menjadi gambaran untuk waktu yang akan datang.

5. Sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat perkotaan dan pedesaan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk mempermudah dan memberikan pengertian dan pandangan yang sama antara penulis dan pembaca mengenai apa yang terdapat dalam variabel. Untuk memberikan pandangan yang sama itulah, penulis memandang perlu untuk menguraikan tentang istilah-istilah yang digunakan di sini, yakni:

1. Bantuan Langsung Tunai

Menurut BPS (2005:13) BLT atau Bantuan Langsung Tunai adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk rakyat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini di gulirkan oleh pemerintah sebagai peruntukkan bagi rumah tangga miskin. Dan merupakan program dari pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

2. Penduduk miskin

BPS mendefinisikan Penduduk miskin sebagai penduduk yang pendapatannya (pengeluarannya) di bawah garis kemiskinan, yaitu sejumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membayar makanan setara

2.100 kkal sehari dan kebutuhan minimum seperti perumahan, pakaian, perawatan kesehatan, pendidikan, transportasi, serta beberapa barang dan jasa lainnya yang diperlukan agar hidup layak.

3. Perkotaan

Definisi perkotaan menurut Bintarto dalam E. Maryani (2002:3) adalah “daerah yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern”.

N. Daljoeni dalam Menno (1992:84) mendefinisikan kota sebagai:

Suatu pemukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih besar dari pada kepadatan wilayah nasional, dengan struktur mata pencaharian non agraris dan tata ruang tanah yang beraneka ragam, serta dengan pergedungan yang berdiri berdekatan.

4. Pedesaan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bintarto dalam Daldjoeni (1998:54) mendefinisikan desa sebagai “perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, sosial, ekonomis, politis dan kultural yang ada di situ, dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lainnya”.